

**FENOMENA BUDAYA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
PERIODE TAHUN 2022-2028 DI DESA PADANG MAHONDANG KECAMATAN
PULAU RAKYAT KABUPATEN ASAHAN**

Indah My See Silalahi¹, Maringan Panjaitan², L. Primawati Degodona³

^{1,2,3}Universitas HKBP Nommensen Medan

Email Korespondensi: indah.silalahi20@student.uhn.ac.id

Email: maringan.panjaitan@uhn.ac.id; primawati.degodona@uhn.ac.id

ABSTRACT

The formation of the Tapanuli Province is one way to improve the welfare of the community through the acceleration of public services considering that the North Sumatra region is quite large and wide, so that areas far from the provincial capital experience obstacles in terms of provincial government services to the community, as a result, community welfare is always focused on areas around the city of Medan. This study aims to examine and analyze public services in the Tapanuli area, then the researcher conducts an analysis if the Tapanuli Province is formed, services to the community dealing with the provincial government will be easier to reach because the government will be close to each region. This paper uses a descriptive qualitative method. data obtained through literature studies and documentation. The results of this study indicate that with the realization of the provincial government to the Tapanuli region, the government's responsiveness in handling all problems and issues between districts/cities will be faster

Keywords: Analysis, Formation of Province, Public Services.

ABSTRAK

The formation of the Tapanuli Province is one way to improve the welfare of the community through the acceleration of public services considering that the North Sumatra region is quite large and wide, so that areas far from the provincial capital experience obstacles in terms of provincial government services to the community, as a result, community welfare is always focused on areas around the city of Medan. This study aims to examine and analyze public services in the Tapanuli area, then the researcher conducts an analysis if the Tapanuli Province is formed, services to the community dealing with the provincial government will be easier to reach because the government will be close to each region. This paper uses a descriptive qualitative method. data obtained through literature studies and documentation. The results of this study indicate that with the realization of the provincial government to the Tapanuli region, the government's responsiveness in handling all problems and issues between districts/cities will be faster

Keywords: Analysis, Formation of Province, Public Services.

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu proses demokrasi yang penting dalam sistem pemerintahan Indonesia di skala kecil. Pemilihan kepala desa ada maka menandakan adanya aktivitas politik yang terjadi di desa tersebut. Pemilihan kepala desa merupakan praktik kontestasi politik yang ada pada tingkat pedesaan. Penyelenggara yang terlibat dalam kontestasi politik tersebut ialah peserta, dan pemilihnya itu adalah warga desa itu sendiri. Idealnya, pemilihan kepala desa harus mencerminkan kedaulatan rakyat dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Di Indonesia, pemilihan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-undang ini menegaskan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

tentang prinsip-prinsip demokrasi yang sehat, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Namun dalam proses pemilihan kepala desa tersebut sering sekali diwarnai dengan adanya fenomena budaya politik uang.

Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Desa Padang Mahondang Kecamatan pulau Rakyat Kabupaten Asahan periode Tahun 2022-2028 menghadirkan 4 (empat) calon. Berdasarkan pengalaman peneliti, dalam proses pemilihan kepala desa yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 tersebut terdapat praktik politik uang, dan hal itu diterima oleh masyarakat desa setempat, mereka menganggap hal itu merupakan hal yang wajar dan sudah lazim terjadi dan seakan menjadi syarat utama jika ingin menjadi pejabat dan bahkan telah jadi budaya masyarakat setempat. Namun hal tersebut dapat mendorong tingkat partisipasi masyarakat desa yang rendah, tetapi cara ini merupakan sebuah kecurangan, dan Hal tersebut mencerminkan penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi yang mendasar seperti keadilan, transparansi dan kesetaraan. dan cara ini berjalan tidak sesuai dengan prinsip Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang telah ditetapkan.

Menurut Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No.112 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 5, Pemilihan kepala desa ialah penyelenggaraan kedaulatan rakyat desa dalam rangka pemilihan kepala desa secara langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, serta adil. Sementara itu Budaya politik uang merujuk pada praktik penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya finansial untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dalam memilih kepala desa. Budaya politik uang merupakan praktik pemberian imbalan materi kepada pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan pilihan mereka dalam proses politik dan pemilihan umum. Politik uang terjadi karena masih banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa, adanya kesenjangan ekonomi, kesadaran dan pendidikan politik masyarakat yang kurang, penegakan hukum yang lemah dan karena budaya transaksional.

Praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pemberian uang tunai, sembako, atau barang lainnya kepada masyarakat oleh calon kepala desa atau tim suksesnya. Selain itu juga terdapat pemberian janji-janji tertentu, seperti proyek pembangunan atau jabatan tertentu di desa, sebagai upaya untuk menarik suara masyarakat. Praktik ini berpotensi mempengaruhi keputusan pilihan masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Ada banyak ahli mengistilahkan praktek politik uang dengan kentut, ia terbaui tapi tidak tahu sumber dari bau tersebut (Maran, 2007) dalam jurnal (Rozy et al. 2020).

Menurut Astuti & Neny Marlina, (2022:160) dalam (Putri 2023) Politik uang ialah suatu praktik yang menjadi budaya di lingkungan masyarakat yang bertujuan agar masyarakat memberi imbalan berupa dukungan suara kepada calon kandidat. Politik uang juga ditemukan sangat kental pada masyarakat desa, karena akan meningkatkan partisipasi masyarakat desa pada saat pemilihan akan dilaksanakan. Praktik semacam ini dapat mengurangi kualitas representasi politik, karena suara pemilih tidak lagi didasarkan pada program-program dan visi-misi calon, melainkan dipengaruhi oleh imbalan material yang diberikan. Demokrasi tidak akan ada ditangan rakyat lagi melainkan demokrasi akan ada diatas uang. Budaya politik uang dalam pemilihan kepala desa telah menjadi salah satu masalah yang terus-menerus mengancam integritas proses demokrasi di banyak desa. Politik uang yang telah membudaya ditengah-tengah masyarakat desa seakan telah menjadi syarat wajib bagi setiap calon pejabat untuk mendapatkan dukungan dan suara terbanyak dari masyarakat. Dan tentunya Kita tahu bahwa politik uang merupakan suatu kegiatan pelanggaran yang melanggar hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 187A Nomor 10 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa baik pemberi maupun penerima akan mendapatkan hukuman pidana.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana dampak politik uang terhadap keputusan pilihan masyarakat Berdasarkan uraian diatas, penelitian tentang fenomena budaya politik uang pada pemilihan kepala desa perlu untuk dilakukan untuk memahami dan mengetahui bagaimana dampak budaya politik uang terhadap keputusan pilihan masyarakat. Tulisan ini akan menjelaskan fenomena budaya politik uang pada pemilihan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



kepala desa periode tahun 2022-2028 di desa Padang Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti seperti perilaku, persepsi, minat, motivasi dan Tindakan dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diteliti. Jenis penelitian dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Metode penelitian ini merupakan suatu metode yang cocok digunakan dalam penelitian dengan maksud ingin memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai Fenomena Budaya Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 Di Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan.

PEMBAHASAN

Fenomena berasal dari bahasa Yunani; *phainomenon*, "apa yang terlihat", fenomena juga bisa berarti: suatu gejala, fakta, kenyataan, kejadian dan hal-hal yang dapat dirasakan dengan pancaindra bahkan hal-hal yang mistik atau klenik. Kata turunan adjektif, fenomenal, berarti: "sesuatu yang luar biasa". Fenomena terjadi di semua tempat yang bisa diamati oleh manusia. Suatu kejadian adalah suatu fenomena. Suatu benda merupakan suatu fenomena, karena merupakan sesuatu yang dapat dilihat. Adanya suatu benda juga menciptakan keadaan ataupun perasaan, yang tercipta karena keberadaannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Fenomena berarti hal-hal yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat diterangkan secara ilmiah atau peristiwa yang tidak dapat diabaikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga diterangkan bahwa persamaan dari fenomena adalah gejala yang berarti hal atau keadaan, peristiwa yang tidak biasa dan patut diperhatikan dan adakalanya menandakan akan terjadi sesuatu (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990:227). Masih menurut kamus besar bahasa Indonesia arti kata fenomena juga dapat bermakna fakta atau kenyataan. Pengertian fenomena sosial adalah masalah sosial yang berupa ketidaksesuaian antara masyarakat atau unsur-unsur kebudayaan yang membahayakan suatu kehidupan kelompok sosial. (menurut Soerjono Soekanto : 1998). Pengertian fenomena adalah suatu fakta yang kita temui di lapangan. (Freddy Rangkuti : 2011). Pengertian fenomena adalah sesuatu hal yang bisa disaksikan dengan panca indera serta dapat dinilai dan diterangkan secara ilmiah. (Buchari Lapau, 2012)

Budaya Politik

Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi namun tidak secara turun temurun (Wikipedia.org). Sedangkan menurut C Wissler, C Kluckhohn, A Davis, A Hoebel: budaya adalah segala tindakan yang harus dibiasakan dengan belajar (detik.com). Dan yang dimaksud dengan budaya politik adalah pola tingkah laku, sebagaimana dikemukakan oleh Rusadi Kantaprawira (1983 : 29) dalam (Prof. Dr. Aim Abdulkarim and Dra. Neiny Ratnaningsih 2012), bahwa:

"Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan komponen nya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Sebenarnya istilah budaya politik tertentu inheren (melekat) pada setiap masyarakat, yang terdiri dari sejumlah individu yang hidup baik dalam sistem politik tradisional maupun modern".

Pengertian *political culture* (budaya politik) menurut Almond dan Verba, (1990:20) dalam (Prof. Dr.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Aim Abdulkarim and Dra. Neiny Ratnaningsih 2012) adalah bagaimana seseorang memiliki komponen , sikap, dan nilai politik yang tercermin dalam sikap dan perilaku politiknya. Pengertian budaya politik menunjuk kepada suatu sikap komponen yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya serta sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu Lebih lanjut menurut Almond dan Verba, warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga-lembaga kenegaraan, perilaku tokoh-tokoh politik, keputusan alat kebijakan yang dihasilkan oleh sistem politik, serta bagaimana seharusnya ia berperan dalam sistem politik. Dari sinilah akan dapat dilihat pola komponen dari tiap warga negara terhadap sistem politik sebagai dasar dalam penentuan klasifikasi tipe kebudayaan politik.

Komponen dalam Budaya Politik.

Dalam pendekatan perilaku politik, terdapat interaksi antara manusia satu dengan lainnya yang akan selalu terkait dengan pengetahuan, sikap, dan nilai seseorang yang kemudian memunculkan komponen sehingga timbul budaya politik. Komponen politik itulah yang kemudian membentuk tatanan dimana interaksi-interaksi yang muncul tersebut akhirnya mempengaruhi budaya politik seseorang. Komponen politik tersebut dapat dipengaruhi oleh komponen individu dalam memandang obyek-obyek politik. Almond dan Verba (1984: 16) mengajukan klasifikasi tipe-tipe komponen politik, yaitu:

1. komponen kognitif, yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan individu terhadap jalannya sistem politik dan atributnya.
2. Komponen afektif, yaitu menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranannya yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu.
3. Orientas evaluatif, yaitu menyangkut keputusan dan praduga tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Tipe Tipe Budaya Politik

Gabriel Almond dalam (Prof. Dr. Aim Abdulkarim and Dra. Neiny Ratnaningsih 2012) mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut :

- a) Budaya politik parokial (*parochial political culture*), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah).
- b) Budaya politik kaula (*subyek political culture*), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif.
- c) Budaya politik partisipan (*participant political culture*), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.

Politik Uang

Politik uang adalah fenomena yang menggabungkan politik dan uang. Politik uang berasal dari dua suku kata, yakni politik dan uang. Adapun persamaan kata politik uang dalam Bahasa Inggris adalah money politics. Kedua kata ini mengisyaratkan makna yang berbeda. Politik mempunyai makna sendiri begitu pula dengan kata uang. Ketika kedua kata ini digabungkan, maka kemudian munculah makna yang baru. Politik uang umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum.

Politik uang merupakan proses transaksional antara calon kandidat yang berkompetisi dalam pemilihan dengan pemilih agar mendapatkan suara secara langsung maupun tidak langsung dari partai politik maupun tokoh masyarakat (Lampus, 2022:2). Politik uang dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan pola yang berbeda. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa politik uang ini terjadi di setiap tingkat kepemimpinan yang ada, atau dengan kata lain politik uang ini dianggap punya pengaruh yang sangat luar

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



biasa. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran yang terjadi pada saat masa kampanye atau pada masa sebelum hari pemilihan itu dilaksanakan.

Politik uang adalah fenomena serius dalam demokrasi yang masih terus berjalan yang menggambarkan adanya penggunaan alat transaksional berbentuk uang atau imbalan sejenisnya yang bertujuan untuk mempengaruhi seseorang, kelompok atau lembaga dalam mengambil keputusan (Darma, 2022:2). Serta pendapat menurut Astuti dan Neny Marlina (2022:160) Politik uang adalah suatu praktik yang menjadi tradisi di lingkungan masyarakat memberi imbalan berupa dukungan suara kepada calon kandidat. Politik uang adalah upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. politik uang atau suap baik pihak pemberi maupun penerima, semuanya telah melakukan pelanggaran yang fatal karena politik uang telah menciptakan kerusakan dalam demokrasi dan mengkhianati kepercayaan publik.

Potensi Budaya Politik Uang

Berdasarkan temuan-temuan di atas, potensi budaya politik uang di Desa Padang Mahondang cukup signifikan. Beberapa faktor yang menunjukkan hal ini antara lain:

- a) Normalisasi praktik: Politik uang dianggap sebagai hal yang wajar dan bahkan diharapkan oleh sebagian masyarakat.
- b) Penerimaan sosial: Mayoritas masyarakat menerima politik uang dengan terbuka.
- c) Ketergantungan ekonomi: Kondisi ekonomi masyarakat membuat mereka rentan terhadap praktik ini.
- d) Lemahnya kesadaran politik: Kurangnya pemahaman tentang demokrasi yang sehat membuat praktik ini terus berlanjut.
- e) Adaptasi praktik: Pelaku politik uang terus mengadaptasi metode mereka untuk menghindari deteksi.

Berdasarkan pembahasan diatas maka penelitian ini memiliki sedikit perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yang dimana penelitian ini berfokus pada potensi budaya politik uang pada pilihan masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan dan masyarakat desa padang mahondang memilih berdasarkan tiga macam perilaku yaitu sosiologis, rasional dan psikologis. Penelitian ini memiliki sedikit temuan yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan di Desa Cibeuteung Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor yang menemukan bahwa pilihan masyarakat disana didasarkan pada sosiologis dan perilaku pemilih didesa tersebut menunjukkan pemilih yang rasional saja. Penelitian terdahulu lainnya tentang fenomena *money politik* pada pemilihan kepala desa patiken menunjukkan bahwa minat masyarakat datang ke TPS dapat dibeli dengan uang. Hal ini juga ditemukan di Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan namun hannya beberapa masyarakat saja yang suaranya dapat dibeli dengan uang. Begitu juga dengan penelitian yang telah dilakukan di desa karama kecamatan rilau ale kabupaten bulukumba, yang hasilnya bahwa politik uang terjadi karena beberapa faktor yaitu ekonomi, tradisi atau kebiasaan, serta kurangnya sosialisasi politik yang dilakukan pemerintah, faktor tersebut juga sama dengan faktor yang ada didesa padang mahondang namun ada faktor lain juga yaitu ekonomi masyarakat yang rata-rata menengah kebawah, pengawasan yang kurang dan pengetahuan masyarakat terhadap politik uang tidak ada.

KESIMPULAN

Potensi budaya politik uang di Desa Padang Mahondang cukup kuat dan mengkhawatirkan. Praktik ini telah mengakar dalam budaya politik lokal dan diterima secara luas oleh masyarakat. Meskipun tidak selalu efektif dalam mempengaruhi pilihan pemilih, keberadaannya tetap mengancam integritas proses demokrasi. Diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan edukasi politik, perbaikan ekonomi, dan penguatan pengawasan untuk mengatasi masalah ini.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Potensi Budaya Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Tahun 2022, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik politik uang telah menjadi fenomena yang dinormalisasi dan dianggap sebagai bagian dari proses pemilihan kepala desa di Desa Padang Mahondang. Mayoritas masyarakat mengakui pernah menyaksikan atau mengalami sendiri praktik ini.
2. Faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya politik uang di desa ini meliputi persaingan antar kandidat yang ketat, tradisi dan kebiasaan yang sudah berlangsung lama, kondisi ekonomi masyarakat, kurangnya pendidikan politik, dan lemahnya pengawasan.

REFERENSI

- Aim Abdulkarim, Neiny Ratnaningsih. 2012. "Budaya Politik, Partisipasi Politik Dan Demokrasi Sebagai Sistem Sosial Politik Indonesia." *Sistem Politik Indonesia* 1.3.
- Andulkarim, A. & Ratmaningsih, N. "Sistem Politik Indonesia".
- Creswell, John W. 2010. "Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Harun, H., Rasyid, A., (2016) "Fikih Korupsi Analisis Politik Uang Di Indonesia Dalam Perspektif Islam". Jakarta : Prenada.
- Kaesmetan, Tri Ori Hapsari. 2019. "Studi Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Daerah Pemilihan Timor Tengah Selatan." *Journal KPU* (1):1–26.
- Putri, Widia. 2023. "Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang (Desa Tenam Kab. Batanghari)."
- Rozy, Fathur, Pratama Aditya Ramadhan, Rachmad Febriansyah, Fandi Ahmad Fahrurrozi, Amarul Ilham Rizky, and Agus Machfud Fauzi. 2020. "Praktik Politik Uang Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019." *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 7(1):37. doi: 10.24036/scs.v7i1.171.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id